

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PADA KANTOR DESA BOTUBILOTAHU
KABUPATEN POHuwATO**

Oleh :

FADILLA ABDULLATIF
E21.19.128

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana



**PROGRAM SARJANA
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
GORONTALO
2020**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PADA KANTOR DESA BOTUBILOTAHU
KABUPATEN POHuwATO**

Oleh :

**FADILLA ABDULLATIF
E21.19.128**

SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar Sarjana
dan telah di setujui oleh Tim Pembimbing pada tanggal
Gorontalo, 07 Juni 2020

PEMBIMBING I



Tamsir, SE, MM
NIDN : 09 010886 01

PEMBIMBING II



Ng Syamsiah B, SE, MM
NIDN : 09 210180 03

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

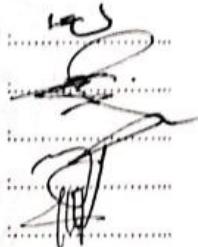
**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
PADA KANTOR DESA BOTUBILOTAHU
KABUPATEN POHUWATO**

Oleh:

FADILLA ABDULLATIF
E21.19.128

Diperiksa Oleh Panitia Ujian Strata Satu (S1)
Universitas Ichsan Gorontalo

1. LELY AFIAKI, SE.,MM
2. HARIS HASAN, SE.,MM
3. SULERSKI MONOARFA, S.pd.MSi
4. TAMSIR, SE.,MM
5. NG SYAMSIYAH B, SE., MM



Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi



Ketua Program Studi Manajemen



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku perguruan tinggi ini.

Gorontalo, 07 Juni 2020



MOTTO DAN PERSEBAHAN

"Hidup Tanpa Cita – Cita Bagaikan Nahkoda Kehilangan Kompas Di Tengah Lautan".

Kupersembahkan sebagai tanda baktiku kepada kedua orang tuaku , saudara – saudaraku, Calon Pendampingku Hidupku, serta teman -- teman sekalian, yang telah memberikan dukungan serta do'a sehingga karya ilmian ini dapat terselesaikan.

Special Buat :

ALMAMATERKU

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato"**. direncanakan. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, Skripsi ini tidak dapat penulis selesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih kepada Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE, M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (YPIPT) Ichsan Gorontalo. Bapak H. Dr. Abdul Gaffar Latjokke, MSi. Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Dr. Ariawan, SE, S.Psi, MM, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo. Ibu Eka Zahra Solikahan, SE, MM, Selaku Ketua Jurusan Manajemen Universitas Ichsan Gorontalo. Bapak Tamsir, SE, MM Selaku penibirabing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Ibu Ng Syamsiah. B, SE, MM Selaku penibirabing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan skripsi ini. Bapak One Mbuinga, Selaku Kepala Desa pada Desa Botubilotahu, yang telah membantu penulis selama pengambilan data di lapangan. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mendidik dan membimbing penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada kedua orang tuaku dan keluarga yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tiada henti. Semua pihak yang tidak

dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan selama penyusunan usulan penelitian ini.

Saran dan kritik, penulis harapkan dari dewan penguji dan semua pihak untuk penyempurnaan penulisan skripsi lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Gorontalo, 07 Juni 2020
Penulis

Fadiil Abdullatif

ABSTRACT

Fadilla Abdullatif "The Effectiveness of Village Financial Management at the Botubilotahu Village office, Pohuwato Regency". Supervised by Tamsir, SE., MM and Ng Syamsiah B, SE., MM.

The purpose of this study was to determine and analyze Village Financial Management in Botubilotahu Village, Pohuwato Regency. Based on the results of data processing using the percentage method, the implementation of village financial management in the village of Botubilotahu Village has been running effectively. This can be proven based on the results of data analysis where the questions posed by the researcher are the responses of the respondents, most of the results are very effective, the rest is effective, quite effective and even less effective so that if averaged, the respondent's response is 89.2%, which means village financial management at the Botubilotahu village office, Pohuwato Regency, it has been running effectively.

Keywords: *Village Financial Management.*

ABSTRAK

Fadilla Abdullatif* Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato".Dibimbing oleh **Tamisir, SE.,MM** dan **Ng Syamsiah B, SE.,MM**.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato. Berdasarkan pada hasil olahan data dengan menggunakan metode persentase maka pelaksanaan pengelolaan keuangan desa pada desa Desa Botubilotahu sudah berjalan efektif. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil analisis data dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti adalah tanggapan responden sebagian besar hasilnya sangat efektif, sebihnya efektif, cukup efektif bahkan kurang efektif sehingga jika dirata-ratakan, tanggapan responden sebesar 89,2% artinya pengelolaan keuangan desa pada kantor desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
PERNYATAAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
<i>ABSTRACT</i>	viii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Rumusan Masalah	4
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 MaksudPenelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Pelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1. Pengertian Keuangan Desa	6
2.2. Pengelolaan Keuangan Desa	6
2.3. Konsep pengelolaan Keuangan Desa.....	9
2.4 Kerangka Pikir	10
2.5 Hipotesis.....	11
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	12
3.1. Obyek Penelitian	12
3.2. metodologi Penelitian.....	12

3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	12
3.4. Populasi	12
3.5. Teknik Analisis Data.....	13
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	15
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	15
4.1.1 Sejarah Terbentuknya Desa Botubilotahu	15
4.1.2. Struktur Aparat Desa Botubilotahu.....	16
4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian	16
BAB V PENUTUP	23
5.1. Kesimpulan.....	23
5.2. Saran	23
DAFTAR PUSTAKA	24
LAMPIRAN	25

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Rentang Skala Item Pertanyaan	17
Tabel 4.2. Tanggapan Responden Tentang Fungsi Kredit Yang Terakait ..	17

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.4. Kerangka Pikir	10
----------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Kuisioner Penelitian	25
Lampiran 2. Jadwal Penelitian	27
Lampiran 3. Hasil Turnitin.....	28
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	29
Lampiran 5. Surat Balasan Lokasi Penelitian	30
Lampiran 6. Surat Rekomendasi Bebas Plagiasi.....	31
Lampiran 7. Curiculum Vitae	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pengelolaan keuangan Desa diperlukan suatu standar pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan keuangan Desa dan pertanggungjawaban keuangan Desa. UU Desaini, terdapat poin penting yaitu adanya aturan yang membahas terkait alokasi anggaran untuk desa.

Di dalam penjelasan Pasal 72 Ayat 2 tentang keuangan desa, jumlah alokasi anggaran yang langsung ke desa, ditetapkan sebesar 10% dari dan diluar dana transfer daerah dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angkakemiskinan, luas wilayah, kesulitan geografi. Dengan adanya dana alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut, tentu diharapkan pembangunan di desa semakin baik dan mampu menyejahterakan masyarakat desa dengan pemanfaatan dana alokasi secara maksimal. Jika mampu mengelola dengan baik dan bijaksana, maka bukan hal yang mustahil jika masyarakat desa yang berada di garis kemiskinan dapat berkurang dan

mungkin saja dapat bersaing dengan masyarakat desa lainnya atau bahkan masyarakat global secara umumnya.

Secara umum, UU Desa telah menjabarkan secara sistematis dan mampu memberikan hak-hak pada setiap desa di Indonesia untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di desanya. Dengan adanya UU ini, maka setiap desa dapat menyejahterakan masyarakatnya sesuai dengan prakarsanya pada masing-masing desa. Salah satu amanat dari undang-undang tersebut dikatakan bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10% setiap tahunnya. Maka dapat diperkirakan setiap desa akan mendapatkan dana sekitar 1,2 miliar hingga 1,4 miliar setiap tahunnya.

Berdasarkan perhitungan dalam penjelasan UU Desa yaitu, 10% dari dana transfer daerah menurut APBN untuk perangkat desa sebesar Rp. 59,2 triliun, ditambah dengan dana dari APBD sebesar 10% sekitar Rp. 45,4 triliun. Total dana untuk desa adalah Rp. 104,6 triliun yang akan dibagi ke 72 ribu desa se-Indonesia. Dana tersebut nantinya akan dialirkan keseluruh desa yang ada di Indonesia melalui kabupaten, tanpa dipotong seperseri pun. Sementara pola penyaluran dana desa, menggunakan pola Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan yang dibuat oleh Kementerian Pekerjaan Umum, yakni Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PPIP). Dua pola ini bisa berarti jalan, irigasi, waduk dan sebagainya. Pemerintah berharap dengan adanya anggaran dana desa, pembangunan dapat merata. Tidak saja di pusat kota, pembangunan juga merata hingga ke pelosok desa.

Kecamatan Marisa merupakan salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Pohuwato yang menjadi lokasi penelitian ini akan menerima sebuah anggaran berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 yang mana telah dijanjikan oleh Pemerintah. Salah satu desa tersebut adalah Desa Botubilotahu. Masyarakat Desa Botubilotahu sampai saat ini hampir 75% dari penduduknya berpenghasilan sebagai petani musiman, sedangkan 25% penduduk terbagi kedalam beberapa macam kategori ada yang berpenghasilan sebagai pedagang, pegawai negeri sipil, karyawan swasta, melihat dari kondisi yang demikian berpengaruh pada pendapatan desa.

Selain itu, dari sumber daya manusianya pun masih relatif rendah. Adapun rata-rata pendidikan masyarakat yang hanya berijazah SLTA ke bawah, melihat dari latar belakang pendidikan para aparatur pemerintah desa baik langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap kesiapan pemerintah dalam mengelola keuangan desa khususnya dalam hal APBDesa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa). Apalagi masih minimnya potensi-potensi daerah yang sekiranya dapat dijadikan tumpuan pembangunan desa.

Dengan demikian berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul dalam penelitian ini adalah **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato.”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka permasalahan terkait penelitian ini adalah : Apakah Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato Sudah Berjalan Efektif ?”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian untuk mengetahui pengelolaan keuangan desa botubilotahu kabupaten pohuwato.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :Untuk mengetahui dan menganalisis Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, penulis berharap dapat bermanfaat antara lain:

a. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen keuangan, terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa.

b. Manfaat Praktis:

1. Bagi Kantor Desa Botubilotahu

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pengelola dana desa dalam pengambilan keputusan dan kebijakan yang akan di ambil.

2. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah di ambil di bangku kuliah ke dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada obyek yang diteliti.

3. Bagi Pihak Luar

Sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

4. Bagi Ilmu Pengetahuan

Untuk menambah kepustakaan di bidang keuangan berdasarkan penerapan yang ada dalam dunia nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Keuangan Desa

Menurut Sofyan Syafri (1996 : 286) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pada tingkat desa. Dana desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.

2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pada Bab III Permenkeu 93/PMK.07/2015 ini dijelaskan tentang penyaluran dana Desa yaitu melalui:

1. Kuasa Pengguna Anggaran yaitu Direktur Dana Perimbangan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara sebagai KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) Dana Desa. (Pasal 12 Ayat 1), dan tugas serta kewenangannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dokumen Pelaksana Anggaran, KPA Dana Desa menyusun DIPA Dana Desa berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota (Pasal 13 Ayat 1). DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Dana Desa disampaikan kepada Direktorat Jenderal Anggaran untuk mendapatkan pengesahan (pasal 13 ayat 2).
3. Berdasarkan DIPA Dana Desa KPA Dana Desa menerbitkan SKPR DD. (SKPR DD, Surat Keputusan Penetapan Rincian Dana Desa adalah surat Keputusan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran yang memuat rincian jumlah Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dalam satu tahun anggaran.)
4. Berdasarkan SKPR DD maka KPA Dana Desa menerbitkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran). Yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.
5. SPP menjadi dasar penerbitan SPM yaitu Surat Perintah Membayar. SPP, SPM dan dokumen anggaran lainnya yang dikeluarkan dalam rangka penyaluran Dana Desa dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV tentang Penggunaan dari Pasal 21 hingga pasal 25 yang bunyinya sebagaimana berikut:

Pasal 21

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

2. Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayaai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
4. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan Pedoman Umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa.

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman umum penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dan pedoman teknis yang diterbitkan oleh bupati/walikota.

Pasal 23

1. Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan bupati/walikota.
2. Persetujuan bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.
3. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/walikota memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

2.3. Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Yang dimaksud dengan pendapatan desa ialah segenap penerimaan yang sah yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber-sumber ialah sumber-sumber penerimaan atau penghasilan desa yang sah. Pengeluaran-pengeluaran desa dapat digolongkan atas pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin, dan pekerjaan-pekerjaan pembangunan.

Sumber-sumber penerimaan desa pada umumnya ialah:

- a. Dari pemerintah
- b. Dari masyarakat
- c. Dari pihak ketiga
- d. Dari kekayaan Desa

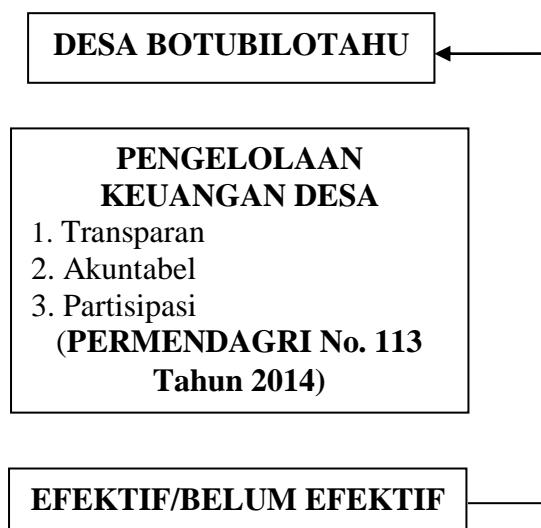
Dengan adanya UU Keterbukaan Informasi Publik membuat masyarakat bisa mengetahui asas perencanaan dan tanggung jawab kebijakan publik dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Informasi dari kebijakan publik untuk masyarakat diperlukan agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dengan istilah *Good Governance*. Karena adanya UU Keterbukaan Informasi Publik masyarakat dengan mudahnya bisa mengakses informasi anggaran yang berada di desa Tempel tersebut.

2.4. Kerangka Pikir

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengetahui Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Keuangan Desa di Desa Sipatana. Dalam konteks penelitian ini, variabel Pengelolaan Keuangan Desa diukur menggunakan tiga indikator. Indikator Pengelolaan Keuangan Desa mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat 1, yang menekankan bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas - asas sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif

Adapun kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar : Skema Kerangka Pikir

2.5. Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah pada Bab I, kajian teori pada Bab II dan kerangka pikirmaka hipotesis penelitian ini adalah:“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato Sudahefektif.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian pada karya ilmiah ini adalah efektivitas pengelolaan keuangan desa pada kantor desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato.

3.2. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,digunakannya metode deskriptif dalam penelitian ini dengan tujuanuntuk menggambarkan suatu kegiatan pengelolaan keuangankhususnya efektivitas pengelolaan keuangan desa pada kantor desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato.

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang signifikan penulis menggunakan metode pengumpulan data berikut:

1. Teknik Observasi
2. Teknik Wawancara

3.4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparat desa yang ada di desa Botubilotahu yang berjumlah 25 orang responden yang terdiri dari Kepala Desa 1 orang, Sekdes 1 orang, Kasi 3 orang, Kaur 3 orang, Kadus 4 orang, BPD 7 orang dan 1 orang karang taruna, Tokoh Masyarakat 2 orang dan 3 orang aparat desa.

3.5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing.* Setelah penelitian selesai menghimpun data di lapangan data tersebut perlu diedit terlebih dahulu sebelum data diolah, dengan kata lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan dalam *record book*, daftar pertanyaan ataupun pada *interview guide* perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki jika masih terdapat hal-hal yang masih meragukan, Sugiyono (2005:89).
2. Pengkodean. Setelah tahap *editing* selesai dilakukan, kegiatan berikutnya adalah mengklasifikasikan data-data tersebut melalui tahapan *koding*. Maksudnya bahwa data yang telah diedit tersebut diberi identitas sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis.
3. Tabulasi (Proses Pembeberan). Tabulasi merupakan bagian terakhir dari pengolahan data. Dengan memasukkan data pada tabel-tabel tertentu dan mengatur angka-angka sehingga dapat dihitung jumlah kasus dalam berbagai kategori.

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Angka persentase

F = Frekuensi (Jumlah responden) jawaban

N = Number of cases (jumlah responden)

4. Penafsiran Data. Merupakan penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Data yang telah dalam bentuk tabel, misalnya, perlu diberikan penjelasan yang terperinci.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Terbentuknya Desa Botubilotahu

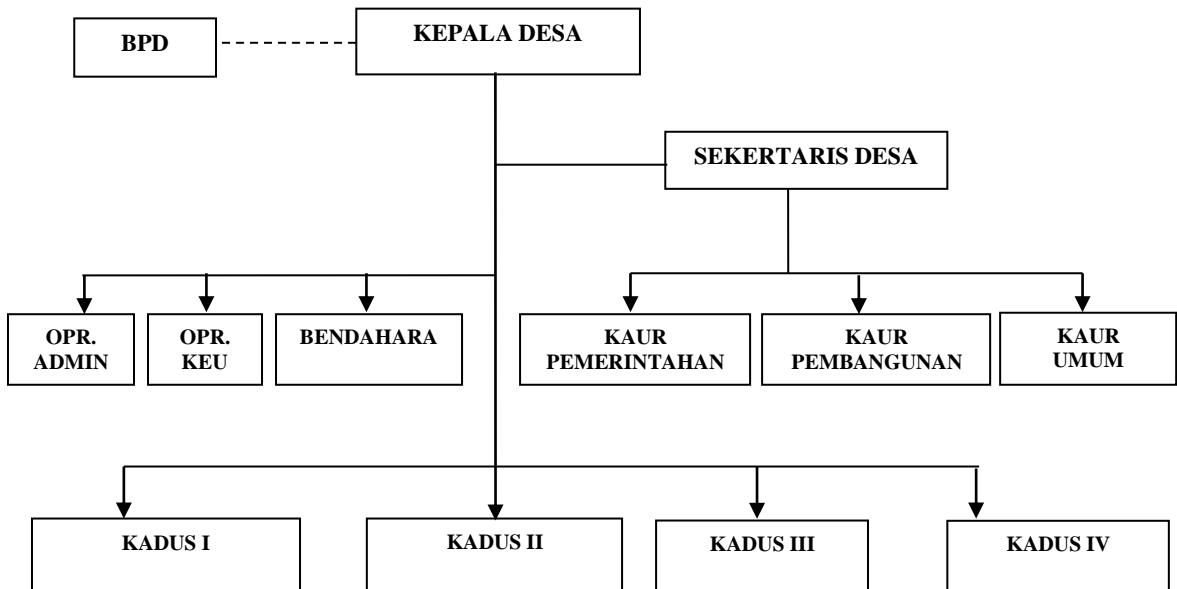
Pada tahun 1993 tepatnya jaman Belanda di Marisa yang pada saat itu masih termasuk wilayah Marisa Kecamatan Paguat terdapat pertambangan Belanda, tepatnya di kampung Hele (sekarang desa Hulawa). Satu-satunya jalan menuju lokasi pertambangan tersebut untuk mengangkut perlengkapan pembangunan dari pantai Marisa hanyalah melewati jalan desa Marisa Utara.

Dipertengahan jalan tepatnya dipusat desa marisa Utara terdapat sebuah batu besar yang menutupi jalan sehingga tidak dapat dilalui oleh orang-orang Belanda. Untuk tidak menghalangi jalan mereka, batu tersebut dipecahkan dengan menggunakan dinamik. Merekapun berhasil memecahkan batu itu dan jalanpun terbuka.

Sejak itulah terbentuklah perkembangan baru dengan sebutan Botubilotahu yang sering disebut Batu Pasang.

Pada tahun 2002, dengan memperhatikan kriteria yang ada. Pemerintah setempat mengadakan perencanaan tentang pemekaran desa. Yang pada tahun 2003 pemekaran tersebut terjadi. Desa pemekaran ini akhirnya resmi dimekarkan dan diberi nama desa Botubilotahu. Dan nama Batu Pasang sekarang ini sudah menjadi nama dusun di desa Marisa Utara Kecamatan Marisa.

4.1.2. Struktur Aparat Desa Botubilotahu



Sumber : Kantor Desa Botubilotahu 2019

4.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Untuk menghitung hasil penelitian, maka langkah yang harus dilakukan adalah mencari skor terendah dan skor tertinggi untuk mendapatkan rentang skala sebagai berikut :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 25 = 25$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 25 = 125$$

Dari perhitungan rentang skala di atas, maka di peroleh bobot terendah sampai bobot tertinggi adalah :

$$\text{Rentang Skala} = \frac{\text{Skor Tertinggi} - \text{Skor Terendah}}{\text{Alternatif}}$$

$$\text{Rentang skala} = \frac{125 - 25}{5} = 20$$

Tabel rentang skala pengukuran skor item peranyaan atau pernyataan penelitian adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Rentang Skala Item Pertanyaan

Range	Kategori
90 -100	Sangat Efektif (SE)
80 - 89	Efektif (E)
60 - 79	Cukup Efektif (CE)
40 - 59	Kurang Efektif (KE)
20 - 39	Tidak Efektif (TE)

Sumber : Olahan Data 2019

Dari hasil olahan data dapat dilihat gambaran hasil penelitian pada Kantor Desa Botubilotahu tentang pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara mempersentasekan tanggapan responden sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.2.
Tanggapan Responden Tentang Fungsi Kredit Yang Terkait

Item	Frekwensi				Kategori
	Ya	%	Tidak	%	
1	23	92	2	8	SE
2	25	100	0	0	SE
3	25	100	0	0	SE
4	25	100	0	0	SE
5	20	80	5	20	E
6	25	100	0	0	SE
7	25	100	0	0	SE
8	25	100	0	0	SE
9	17	68	8	32	CE
10	13	52	12	48	KE

Sumber : Olahan Data 2019

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel diatas menunjukkan bahwa :

Pada item pertama menurut responden selama ini bahwa pengelolaan keuangan desa sudah transparansi pengelolaan anggaran,mendapat tanggapan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis

sebanyak 92% responden yang menjawab Ya dan 8% menjawab Tidak. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan desa sudah transparan dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Pada item kedua akses untuk memperoleh dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa mudah diperoleh pada kantor desa Botubilotahu,mendapat tanggapan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 100% responden yang menjawab Ya. Hal ini berarti akses untuk memperoleh dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa mudah diperoleh dan masuk dalam kategori Sangat Efektif.

Pada item ketiga pihak pengelola keuangan desa pada kantor desa Botubilotahu terbuka kepada masyarakat dalam hal pengelolaan keuangan desa, hal ini mendapat tanggapan sangat efektif, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 100% responden yang menjawab Ya. Hal ini berarti proses pengelolaan keuangan desa pada kantor desa Botubilotau sangat terbuka kepada masyarakat dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Pada item keempat aparat desa menganggap transparansi pengelolaan keuangan desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan rakyat dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di desa Botubilotahu,hal ini mendapat tanggapan sangat efektif dari responden, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 100% responden yang menjawab Ya. Hal ini berarti bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan rakyat dalam hal pembangunan dan

kesejahteraan masyarakat di desa Botubilotahu dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Pada item kelima tahapan pengelolaan keuangan desa telah melibatkan semua unsur-unsur masyarakat, hal ini mendapat tanggapan yang efektif dari responden, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 80% responden yang menjawab Ya dan yang menjawab Tidak hanya 20%. Hal ini berarti bahwa tahapan pengelolaan keuangan desa telah melibatkan semua unsur-unsur masyarakat di desa Botubilotahu dan masuk dalam kategori efektif.

Pada item keenam pengelolaan keuangan desa di sajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat di desa Botubilotahu, hal ini mendapat tanggapan sangat efektif dari responden, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 100% responden yang menjawab Ya. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan desa di sajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat di desa Botubilotahu sudah baik dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Pada item ketujuh dalam hal pengelolaan keuangan desa pihak pengelola keuangan memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan publik dan golongan di desa Botubilotahu, hal ini mendapat tanggapan sangat efektif dari responden, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 100% responden yang menjawab Ya. Hal ini berarti bahwa kepentingan publik dan golongan di desa Botubilotahu menjadi bahan pertimbangan dalam hal pengelolaan keuangan di desa Botubilotahu dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Pada item kedelapan dalam hal pengelolaan keuangan desa pihak pengelola keuangan melibatkan pemerintah desa di desa Botubilotahu, hal ini mendapat tanggapan sangat efektif dari responden, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 100% responden yang menjawab Ya. Hal ini berarti bahwa pemerintah desa ikut langsung mengawasi pengelolaan keuangan di desa Botubilotahu dan masuk dalam kategori sangat efektif.

Pada item kesembilan dalam hal keterlibatan masyarakat tentang perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di desa Botubilotahu, mendapat tanggapan cukup efektif dari responden, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 68% responden yang menjawab Ya dan yang menjawab Tidak 32%. Hal ini berarti bahwa masyarakat merasa tidak semuanya ikut langsung dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan di desa Botubilotahu dan masuk dalam kategori cukup efektif.

Pada item kesepuluh dalam hal keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa di desa Botubilotahu mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil, mendapat tanggapan kurang efektif dari responden, hal ini dapat dilihat dari hasil analisis data yang diperoleh penulis sebanyak 52% responden yang menjawab Ya dan yang menjawab Tidak 48%. Hal ini berarti bahwa masyarakat tidak semuanya terlibat mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil dalam pengelolaan keuangan di desa Botubilotahu dan masuk dalam kategori kurang efektif.

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PADA KANTOR
DESA BOTUBILOTAHU**

No	Pertanyaan Kuisioner Berdasarkan Asas Keuangan Desa PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 (Transparan, Akuntabel dan Partisipasi)	Alternatif Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Selama ini menurut saya pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran	92%	8%
2	Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa mudah di peroleh	100%	0
3	Saya merasa pihak pengelola keuangan desa Botubilotahu terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa	100%	0
4	Saya merasa transparansi pengelolaan keuangan desa dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat	100%	0
5	Dalam pengelolaan keuangan desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat	80%	20%
6	Pengelolaan keuangan desa disajikan secara transparan, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat	100%	0
7	Tidak menjadikan kepentinan golongan dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa	100%	0
8	Saya merasa pengelolaan keuangan desa melibatkan pemerintah desa (sebagai pemeriksa administrasi keuangan desa)	100%	0
9	Saya merasa masyarakat Desa Botubilotahu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa	68%	32%
10	Pengelolaan keuangan Desa mengenai penerimaan dan pemanfaatan hasil, masyarakat harus terlibat	52%	48%

Pengelolaan keuangan pada kantor desa Desa Botubilotahusudah efektif dalam hal ini pihak kantor desa selama ini mengelola keuangan desa dengan transparan dalam hal akses untuk memperoleh dokumen publik tentang

pengelolaan keuangan desa mudah diperoleh, proses pengelolaan anggaran terbuka kepada masyarakat dan dapat mengakomodasi dan meningkatkan usulan rakyat dalam hal pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Dari segi tahapan pengelolaan keuangan pihak pengelola melibatkan semua unsur masyarakat desa tidak semuanya di respon oleh responden karena berdasarkan hasil penelitian masih ada sebagian unsur masyarakat yang merasa belum dilibatkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Pengelolaan keuangan desa disajikan secara terbuka, cepat dan tepat kepada seluruh masyarakat sudah sangat efektif apa lagi dalam hal pengelolaan keuangan pihak pengelola selalu mempertimbangkan kepentingan publik dan golongan dan sekaligus melibatkan pemerintah desa sebagai fungsi pemeriksa administrasi keuangan desa di desa Botubilotahu. Dalam hal keterlibatan dalam perencanaan dan pelaksanaan keuangan desa masuk dalam kategori cukup efektif dikarenakan sebagian tidak terlibat dalam hal ini bahkan sebagian masyarakat ada yang merasa tidak terlibat dalam penerimaan dan pemanfaatan hasil pengelolaan keuangan desa, namun secara keseluruhan dari seluruh item pertanyaan yang diajukan oleh peneliti total rata-rata tanggapan responden sebesar 89,2% artinya pengelolaan keuangan desa pada desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa, pelaksanaan pengelolaan keuangan desapada desa Desa Botubilotahu sudah berjalan efektif. hal ini dapat dibuktikan berdasarkan hasil analisis data dimana pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penelitiadalah tanggapan responden sebagian besar hasilnya sangat efektif, selebihnya efektif, cukup efektif bahkan kurang efektifsehingga jika dirata-ratakan,tanggapan responden sebesar 89,2% artinya pengelolaan keuangan desa pada kantor desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato sudah berjalan efektif.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan penelitian ini maka :

1. Pihak Pengelola keuangan desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwatodisarankan untukmempertahankan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangannya.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti pada kantor desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato menganalisis judul selain yang sudah di teliti oleh penulis yaitu efektivita pengelolaan keuangan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchjana. 1989. KAMUS KOMUNIKASI. Bandung : PT.Mandar Maju.
- Harahap Sofyan Syafri, Drs, MS Ac, 1996, Teori Akuntansi LAPORAN KEUANGAN, Bumi Aksara, Jakarta.
- Keban, Y.T. (2004). Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori, dan Isu. Yogyakarta: Gava Media
- Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja sektor publik. yogyakarta: UPP AMPYKPN.
- Nasir.M .2005, Metode Usulan Penelitian,Penerbit Ghalia Indonesia,Bogor
- Pasolong, H. (2008). Teori Administrasi Publik. Jakarta : Alfabeta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014
pasal 1
tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana
Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan
Keuangan Desa
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.
- , Metode Usulan Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R &
D,2005,Alfabeta
Bandung
- Susanto, Astrid S. (1975). *Efektifitas*. Bandung: Bina Cipta
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara
Pengalokasian,
Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa, PMK
No.93
Tahun 2015
- Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)
point(d),
dan butir(4).
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

KUISIONER PENELITIAN

Kuisioner ini bertujuan untuk memperoleh informasi langsung terkait dengan penyusunan skripsi saya, yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato”**.

Data yang Bapak/Ibu berikan semata-mata digunakan hanya untuk keperluan penelitian dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan nama baik atau hal-hal yang dapat merugikan Bapak/Ibu berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa berdasarkan asas keuangan desa.

Untuk itu, mohon kiranya Bapak/Ibu untuk dapat menjawab dan memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tanpa takut adanya tekanan dari pihak tertentu. Atas bantuan dan partisipasinya, saya ucapan terima kasih.

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONER

Berikan jawaban dengan tanda (✓) terhadap semua pertanyaan dalam kuisioner ini dengan memberikan penilaian sejauh mana pertanyaan itu sesuai dengan realita. Pilihan jawaban dari pertanyaan kuisioner ini adalah **Ya** atau **Tidak**.

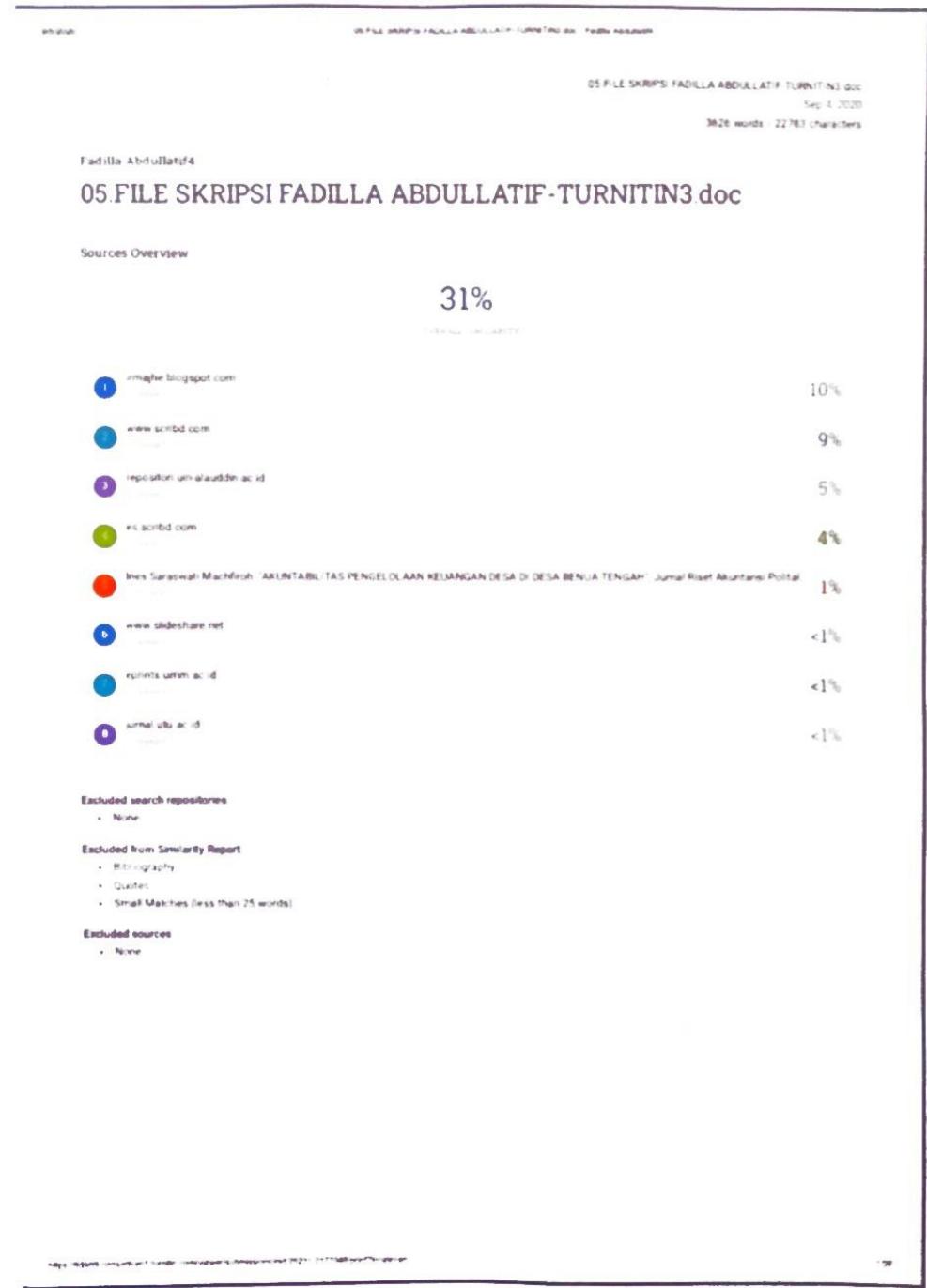
DAFTAR PERTANYAAN

No	Pertanyaan Kuisioner Berdasarkan Asas Keuangan Desa PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014 (Transparan, Akuntabel dan Partisipasi)	Alternatif Jawaban	
		Ya	Tidak
1	Selama ini menurut saya pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan pengelolaan transparansi anggaran		
2	Akses untuk memperoleh dokumen publik tentang pengelolaan keuangan desa mudah di peroleh		
3	Saya merasa pihak pengelola keuangan desa Botubilotahu terbuka kepada masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan desa		
4	Saya merasa transparansi pengelolaan keuangan desa dapat		

	mengakomodasi dan meningkatkan usulan/suara rakyat		
5	Tahapan pengelolaan keuangan desa melibatkan semua unsur-unsur masyarakat		
6	Pengelolaan pengelolaan keuangan desa disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat		
7	Kepentingan publik dan golongan menjadi perhatian dan pertimbangan utama dalam pengelolaan keuangan desa		
8	Saya merasa pengelolaan keuangan desa melibatkan pemerintah desa (sebagai pemeriksa administrasi keuangan desa)		
9	Saya merasa masyarakat Desa Botubilotahu terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa		
10	Pengelolaan keuangan Desa mengenai pencitraan dan pemanfaatan hasil, masyarakat harus terlibat		

----- Terima Kasih -----

Jadwal Penelitian|



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975; Fax: (0435) 829976; E-mail:lembagapenelitian@unisan.ac.id

1889/PIP/LEMLIT-UNISAN/V/2020

Ma yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulham, Ph.D
NIDN : 0911108104
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian Universitas Ichsan Gorontalo

Meminta kesediaannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan
proposal/skripsi, kepada:

Nama Mahasiswa : Fadilla Abdullatif
NIM : E2119128
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Manajemen
Lokasi Penelitian : Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato
Judul penelitian : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa
Botubilotahu Kabupaten Pohuwato

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





PEMERINTAHAN KABUPATEN POHuwATO

KECAMATAN MARISA

DESA BOTUBILOTAHU

SURAT KETERANGAN

No. 470/DBB-MRS/383/V/2020

Sehubungan dengan Surat Desa Botubilotahu Kec. Marisa Kab. Pohuwato dengan nomor : 470/DBB-MRS/383/V/2020. Hal izin mengadakan penelitian tertanggal 5 Mei 2020 maka Kepala Desa Botubilotahu dengan ini menerangkan nama mahasiswa ini :

Nama : FADILLA ABDULLATIF

NIM : E21.19.128

Prodi : Ekonomi

Kampus : Universitas Ichsan Gorontalo

Benar telah mengadakan penelitian di Desa Botubilotahu pada tanggal 5 Mei 2020 s/d 25 Mei 2020, guna melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato”**

Demikian Surat Keterangan dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Marisa, 25 Mei 2020

Kepala Desa Botubilotahu

ONE MBUINGA



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN
(UNISAN) GORONTALO

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NO. 84/D/O/2001
JL. Raden Saleh No. 17 Telp. (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 620/UNISAN-G/SR-BP/VII/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

~~~~~  
Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Fadilla Abdullatif  
NIM : E21.19.128  
Program Studi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kantor Desa Botubilotahu Kabupaten Pohuwato

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 31%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Buku Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Juli 2020  
Nim Verifikasi,  
Sunarto Taliki, M.Kom  
NIP NRP 0906058301

Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. Pembimbing I dan Pembimbing II
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Dipindai dengan CamScanner

## **CURRICULUM VITAE**

### **1. Identitas Pribadi**



Nama : Fadilla Abdullatif  
NIM : E21.19.128  
Tempat/TglLahir : Marisa, 30 Agustus 1998  
JenisKelamin : Perempuan  
Angkatan : 2016  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Manajemen  
Agama : Islam  
Alamat : Desa Botubilotahu, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato

### **2. Riwayat Pendidikan**

#### **a. Pendidikan Formal**

1. Menyelesaikan Belajar di SDN 1 Botubilotahu, Kabupaten Pohuwato Pada Tahun 2010
2. Kemudian Melanjutkan ke Jenjang Berikutnya di SMP Negeri 2 Marisa Kec. Marisa, Kab. Pohuwato Pada Tahun 2013
3. Selanjutnya Menyelesaikan Belajar di SMA Negeri 1 Marisa, pada Tahun 2016
4. Melanjutkan Pendidikan Tinggi di Universitas Ichsan Gorontalo, Mengambil Jurusan Manajemen di Fakultas Ekonomi.
5. Mengikuti Kuliah Kerja Lapangan Pengabdian technopreneur ( KKLP Technopreneur ) di Desa Tirto Asri, Kec. Taluditi, Kab. Gorontalo pada tahun 2019.